



Kota Mungkid, 25 Maret 2021

Nomor : 069.2//4/01.08/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 4 (empat) Dokumen  
Perihal : Penyampaian Dokumen  
LKjIP 2020, PK 2021,  
Renaksi PK 2021 dan  
RKT 2022.

Kepada :  
Yth. 1. Menteri PAN RB  
2. Menteri Dalam Negeri  
3. Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional  
di  
JAKARTA

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2020.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021.
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021.
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan :

1. Perwakilan BPKP Provinsi DIY
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah
3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788 181 Fax. (0293) 788 122

Kota Mungkid 56511

[www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

2021





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**INSPEKTORAT**

Jl. Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215  
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: [www.inspektorat.magelang.co.id](http://www.inspektorat.magelang.co.id)


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj IP) TAHUN 2020 KABUPATEN MAGELANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu perbaikan namun kelemahan tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) telah diyakini keandalannya.

Kota Mungkid, 25 Maret 2021

INSPEKTUR  
KABUPATEN MAGELANG

  
UMI NANIYATI CHAULIYANAH, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1963071990032004

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

LKjIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dan dukungan instansi terkait, serta partisipasi berbagai elemen masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan masukan guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 25 Maret 2021

The seal of Kabupaten Magelang, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI MAGELANG' and 'MAGELANG'.

BUPATI MAGELANG,  
ARIFIN, S.IP

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Dokumen LKjIP mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran kinerja Tahun 2020 dilakukan pada indikator makro dengan 5 tujuan strategis dan 9 indikator kinerja serta indikator mikro berjumlah 15 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja tujuan strategis Kepala Daerah tahun 2020 sebesar 82,02% (tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja tujuan telah tercapai 74,52% (sedang). Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis belum tercapai sesuai target, baik terhadap target tahun 2020 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2024.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 sebesar 107,19% (sangat tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran sebesar 96,56% (sangat tinggi). Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui dibandingkan target kinerja tahun 2020, sedangkan jika dibandingkan target akhir periode RPJMD pada tahun 2024 baru mendekati target yang ditetapkan.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai rata-rata 73,66% dengan kategori Sedang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,38% jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,04%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91%  $\leq$  100%) sebanyak 71 (73,96%) program, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi program tertinggi sebesar 111(72,08%). Capaian program Sangat Rendah pada kategori sedang ( $\leq$  50 %) sebanyak 2 (2,08%) program, jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 0,97%, dengan realisasi sebanyak 5 (3,25%) program, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan perbaikan.

Tingkat efisiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,23%, tingkat efisiensi tersebut naik dibandingkan tahun 2019 dengan tingkat efisiensi sebesar 7,85%. Tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik.

## **DARTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Aspek Strategi Organisasi	3
1.5. Isu Strategis Organisasi	10
1.6. Sistematika	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Ikhtisan Perjanjian Kinerja	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi	27
3.2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020	38
3.3. Analisa Efisiensi	75
3.4. Prestasi	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	83
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel :	1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Magelang Tahun 2020	5
Tabel :	1.2	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang	6
Tabel :	2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020 pada Indikator Tujuan	13
Tabel :	2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020 pada Indikator Sasaran	14
Tabel :	2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang	16
Tabel :	2.4	Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	21
Tabel :	3.1	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna	28
Tabel :	3.2	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Pada Indikator Tujuan	29
Tabel :	3.3	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Pada Indikator Sasaran	31
Tabel :	3.4	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020	33
Tabel :	3.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2020	38
Tabel :	3.6	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2020	39
Tabel :	3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020Magelang,	39
Tabel :	3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020	40
Tabel :	3.9	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat tahun 2020	40



Tabel :	3.10	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2020	41
Tabel :	3.11	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	41
Tabel :	3.12	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	42
Tabel :	3.13	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender tahun 2020	46
Tabel :	3.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	47
Tabel :	3.15	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah tahun 2020	48
Tabel :	3.16	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	49
Tabel :	3.17	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel Tahun 2020	50
Tabel :	3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2020	51
Tabel :	3.19	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	51
Tabel :	3.20	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	52
Tabel :	3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020	53
Tabel :	3.22	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	53
Tabel :	3.23	Jumlah Kasus <i>Corona Virus Disease</i> – 19 Kabupaten Magelang, Sampai dengan 31 Desember 2020	54
Tabel :	3.24	Jumlah Kasus <i>Corona Virus Disease</i> – 19 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Magelang Sampai dengan 31 Desember 2020	54



Tabel :	3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2020	55
Tabel :	3.26	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	56
Tabel :	3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020	56
Tabel :	3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak Dan Berkualitas Tahun 2020	57
Tabel :	3.29	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	58
Tabel :	3.30	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	59
Tabel :	3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020	60
Tabel :	3.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2020	61
Tabel :	3.33	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	61
Tabel :	3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2020	62
Tabel :	3.35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020	63
Tabel :	3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2020	64
Tabel :	3.37	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2020	65
Tabel :	3.38	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	66
Tabel :	3.39	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2020	69
Tabel :	3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Komunikasi Informasi Tahun 2020	70

Tabel :	3.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020	71
Tabel :	3.42	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	42
Tabel :	3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020	73
Tabel :	3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2020	74
Tabel :	3.45	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1.1	Peta Kabupaten Magelang	4
Gambar : 3.1	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2016-2020	43
Gambar : 3.2	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020	44
Gambar : 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Persen) Pada Tahun 2016-2020	48
Gambar : 3.4	Penghargaan Perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	52
Gambar : 3.5	Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).	63
Gambar : 3.6	Penghargaan Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	67
Gambar : 3.7	Penghargaan Atas Komitmen Pengurangan Resiko Bencana Dari Badan Nasional Penanggulangan	67
Gambar : 3.8	Penghargaan Kearsipan Nasional kategori Sangat Memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	69





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

**Akuntabilitas** pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai sasaran strategis daerah. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana arah pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Nawacita diamanatkan pemerintah daerah untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Aspek Strategis Organisasi
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Sistematika

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis melalui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

#### **1.4. Aspek Strategi Organisasi**

##### **1.4.1. Visi dan Misi**

Berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yaitu: “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani“, serta mengingat pesan wasiat Bung Karno tentang doktrin TRI SAKTI Bung Karno, yaitu: (1) Berdaulat di bidang politik, (2) Berdikari di bidang ekonomi, dan (3) Berkepribadian di bidang kebudayaan, serta dengan tetap memperhatikan moto Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau MAGELANG GEMILANG, maka ditetapkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah :

#### **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun spiritual (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.



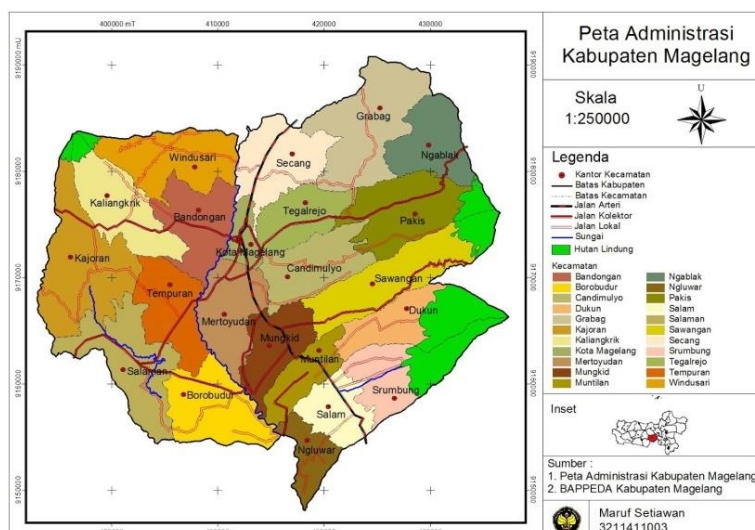
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

#### 1.4.2. Kondisi Geografi dan Demografi



Gambar : 1.1. Peta Kabupaten Magelang

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" Bujur Timur dan diantara 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" Lintang Selatan. Berdasarkan letak ini menjadikan

**Batas Administrasi**

**Sebelah Utara:**  
Kab. Temanggung dan Kab. Semarang

**Sebelah Timur :**  
Kab. Semarang & Kab. Boyolali

**Sebelah Selatan :**  
Kab. Purworejo & DIY

**Sebelah Barat :**  
Kab. Temanggung & Kab. Wonosobo

**Di Tengah-tengah :**  
Kota Magelang

Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Buku Kabupaten Magelang tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2020 sebanyak 1.299.859 jiwa, kepadatan penduduk 1.197 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010–2020 sebesar 0,93%. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kabupaten Magelang Tahun 2020

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	47 213	45 309	92 522
5-9	47 199	45 860	93 059
10-14	50 651	48 011	98 662
15-19	50 598	47 952	98 550
20-24	52 662	49 810	102 472
25-29	51 223	48 702	99 925
30-34	48 734	46 290	95 024
35-39	47 404	46 285	93 689
40-44	48 283	48 061	96 344
45-49	46 618	47 204	93 822
50-54	44 087	44 900	88 987
55-59	36 547	37 833	74 380
60-64	30 923	31 030	61 953
65-69	23 241	24 193	47 434
70-74	14 876	16 132	31 008
75+	14 730	17 298	32 028
<b>Kab. Magelang</b>	<b>654 989</b>	<b>644 870</b>	<b>1 299 859</b>

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Magelang, "Kabupaten Magelang Dalam Angka 2021".

#### 1.4.3. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 Km<sup>2</sup> atau 108.573 Ha, kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Tahun 2019, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86.405 Ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 Ha dan lahan kering seluas 49.543 Ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya untuk sawah irigasi seluas 27.732 Ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8.948 Ha.

Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41Km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 Km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel.1.2

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
<b>Total :</b>		<b>1.085,73</b>	<b>100.00</b>		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2021

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa, 5 kelurahan, 2.750 dusun dan 10.968 Rukun Tetangga (RT).

#### 1.4.4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.



Dalam rangka membentuk perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah dan diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
  6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  15. Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
  16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  17. Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
  18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah berjumlah 4 (empat) terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
1. Kecamatan Salaman;
  2. Kecamatan Borobudur;
  3. Kecamatan Ngluwar;
  4. Kecamatan Salam;
  5. Kecamatan Srumbung;
  6. Kecamatan Dukun;

7. Kecamatan Sawangan;
8. Kecamatan Muntilan;
9. Kecamatan Mungkid;
10. Kecamatan Mertoyudan;
11. Kecamatan Tempuran;
12. Kecamatan Kajoran;
13. Kecamatan Kaliangkrik;
14. Kecamatan Bandongan;
15. Kecamatan Candimulyo;
16. Kecamatan Pakis;
17. Kecamatan Ngablak;
18. Kecamatan Grabag;
19. Kecamatan Tegalrejo;
20. Kecamatan Secang; dan
21. Kecamatan Windusari.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan berjumlah 5 (lima) terdiri dari:

- a. Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
- b. Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
- c. Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
- d. Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
- e. Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya, antara lain:
  - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
  - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.



- c. Tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
  - 1) Perumusan kebijakan pemerintah kecamatan;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;
  - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah kecamatan;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

#### 1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Magelang dapat dilihat dari perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, pembangunan gender dan pemberdayaan gender. IPM adalah suatu indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, antara lain angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita.

#### 2. Daya Saing Daerah

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan cenderung melambat mengindikasikan belum optimalnya daya saing ekonomi Kabupaten Magelang. Di sisi lain, sebenarnya Kabupaten Magelang memiliki potensi yang cukup banyak tercermin dari 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah.

Dalam era globalisasi dan bisnis modern di mana banyak wilayah yang memiliki produk hampir sama, maka merek atau *brand* menjadi suatu keharusan. Sampai saat ini, Kabupaten Magelang belum memiliki *branding* yang diharapkan menjadi diferensiasi, memperkuat identitas, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, perlu dibangun *branding* Kabupaten Magelang yang akan menjadi

salah satu cara efektif meningkatkan daya saing dan mampu mencakup aspek-aspek potensial Kabupaten Magelang secara menyeluruh, walaupun tetap ada penekanan pada aspek yang paling penting yaitu “menjual”.

Selain hal yang dikemukakan di atas, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Isu strategis di Kabupaten Magelang berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, dan persampahan, dimana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah dan swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat hubungan antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan daya saing daerah, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan, dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global, serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah.

### 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif.

## 1.6. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja dan pemetaan anggaran pada tahun 2020.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja pemerintah daerah, untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### 3.2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

Sub bab ini menyajikan evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja tujuan dan sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

#### 3.3. Analisa Efisiensi

Pada sub bab ini dilakukan analisa efisiensi untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran.

#### 3.4. Prestasi

Subbab ini berisi prestasi yang diarah oleh Kabupaten Magelang.

### BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Perjanjian Kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA



### 2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dan ditetapkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen ini merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020.

PERENCANAAN KINERJA  
2.1. Ikhtisar Perjanjian  
Kinerja

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang  
Tahun 2020 pada Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
<b>A</b>	<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,58	Angka (0-100)
2	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	2	Inflasi	2,5-4,0	persen
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	9.400,64	ribu rupiah
		4	Angka Kemiskinan	9,43-10,43	persen



No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
3	Meningkatnya pembangunan berbasis gender	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,21	Angka (0-100)
<b>B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>					
1	Meningkatnya daya saing daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,1-5,6	persen
		7	PDRB Per Kapita	26,7	juta rupiah
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	69,93	persen
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>					
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	65,53	Angka (0-100)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2020, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2020.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2020 pada Indikator Makro terdapat 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai sasaran kinerja Kepala Daerah. Jumlah sasaran strategis pada indikator mikro berjumlah 15 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja, secara terinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang  
Tahun 2020 pada Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
<b>A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>					
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	7,86	tahun
		2	Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	94,41	persen
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	73,56	tahun
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS*)	0,58	persen
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	78,42	Angka (0-100)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	63,77	persen
6	Terkendalinya tingkat pengangguran terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *)	2,4-3,0	persen
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,33	angka (0-100)
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori
<b>B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>					
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	IKLH	72,12	angka (0-100)
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	67,74	persen
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	4.868,86	milyar rupiah
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.373,16	milyar rupiah
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	7.648,60	milyar rupiah
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.523,19	milyar rupiah
		17	Pertumbuhan Investasi	5	persen
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	86,42	persen
		19	Indeks Desa Membangun	0,68	angka (0-1)
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	63,03 (B)	angka (0-100) (huruf)
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,31 – 2,50	angka (0-5)
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	WTP	-
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	angka (0-100)
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	0,55	angka (0-1)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2020.

Catatan : \*) Indikator Negatif

Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan  
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020  
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>		Sumber anggaran dari: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah Hibah dan SILPA
A	Urusan Pendidikan		
1	Program Pendidikan Sekolah Dasar	103.306.463.888	
2	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.969.111.203	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760	
4	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420	
B	Urusan Kesehatan		
1	Program Pelayanan Kesehatan	180.181.934.986	
2	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	98.000.827.211	
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33.223.844.803	
4	Program Sumber Daya Kesehatan	10.577.132.139	
5	Program Kesehatan Masyarakat	4.351.312.880	
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Jalan	41.324.486.900	
2	Program Peningkatan Layanan Sumber Daya Air Dan Jaringan Irigasi	8.259.165.600	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana ke-PU-an	1.904.473.125	
5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	
D	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	306.725.460	
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	4.670.797.180	
E	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.808.697.000	
2	Program Penegakan Perda	252.696.000	
3	Program Penanggulangan Kebakaran	7.885.458.000	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	368.700.900	
5	Program Penanggulangan Bencana	2.938.216.690	
F	Urusan Sosial		
1	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )	793.840.760	
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.251.047.970	
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
G	Urusan Tenaga Kerja		
1	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.150.267.600	
2	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	234.131.165	
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	221.643.700	
I	Urusan Pangan		
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	997.260.675	
J	Urusan Lingkungan Hidup		
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	726.177.210	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	85.204.910	
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	10.799.791.450	
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.277.307.000	
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	747.099.930	
K	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		
1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	
L	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895	
2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	444.410.015	
3	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1.818.863.071	
M	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Program Keluarga Berencana	7.463.665.665	
2	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	249.376.660	
N	Urusan Perhubungan		
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	815.233.250	
2	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	665.058.905	
3	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	22.694.077.380	

<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
O	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.448.380.400	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	378.981.900	
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.534.287.225	
P	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.142.000	
2	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	197.037.000	
Q	Urusan Penanaman Modal		
1	Program Pelayanan Investasi	20.793.040	
2	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	37.744.500	
3	Program Pelayanan Perijinan	333.550.000	
R	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.366.670.063	
2	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	161.686.125	
S	Urusan Statistik		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	57.096.850	
T	Urusan Persandian		
1	Program Persandian	464.424.000	
U	Urusan Kebudayaan		
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970	
V	Urusan Perpustakaan		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	286.893.070	
W	Urusan Kearsipan		
1	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	60.668.980	
2	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	136.465.200	
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>		
X	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.215.047.600	
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	463.033.100	
Y	Urusan Pariwisata		
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	8.213.170.264	
2	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	139.106.076	
Z	Urusan Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.248.628.830	
2	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	531.587.498	



<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.431.144.605	
4	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	286.298.630	
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.808.882.929	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	756.085.080	
AA	Urusan Perdagangan		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	192.510.000	
2	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.345.546.000	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	186.538.470	
AB	Urusan Perindustrian		
1	Program Pengembangan Industri	216.440.600	
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		
AC	Urusan Administrasi Pemerintahan		
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.301.886.200	
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	424.018.510	
3	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.292.359.000	
4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	873.041.500	
5	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	202.835.020	
6	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	332.829.200	
7	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	290.483.200	
8	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	596.523.500	
9	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	768.199.800	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	19.335.571.680	
11	Program Pelayanan Publik Kecamatan	218.335.982	
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8.191.343.245	
AD	Urusan Pengawasan		
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.500.475.580	
AE	Urusan Perencanaan		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
AF	Urusan Keuangan		
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.954.608.845	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.501.900.190	
3	Program Pengelolaan Aset Daerah	3.821.262.419	
AG	Urusan Kepegawaian		
1	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	1.220.088.142	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.233.899.106	
3	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	309.123.125	
AH	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>766.081.695.405</b>	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Untuk mendukung pelaksanaan urusan anggaran APBD Kabupaten Magelang setelah perubahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 766.081.695.405,00 (*Tujuh ratus enam puluh enam milyar delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah*). Anggaran tersebut terdiri dari 98 program untuk mendukung pencapaian kinerja pada 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja dan 15 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja. Sumber pendanaan terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Hibah dan SILPA. Jumlah anggaran tersebut merupakan anggaran untuk mendukung program di tiap urusan, sedangkan 2 program (Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) yang merupakan urusan seluruh SKPD tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan jumlah anggaran Rp. 309.627.541.195,00 (*Tiga ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*). Sehingga keseluruhan APBD Kabupaten Magelang tahun 2020 sebesar Rp. 1.075.709.236.600,00 (*satu triliun tujuh puluh lima milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

Untuk mengetahui dukungan program dan pendanaan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja, maka dilakukan pemetaan program dan sasaran strategis terhadap capaian indikator strategis pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.  
Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis  
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3	4	5	6	6	8	
<b>A</b>								
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>								
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	7,86	tahun	Program Pendidikan Sekolah Dasar	103.306.463.888	13,485
		2	Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.969.111.203	6,131
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	94,41	persen	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760	0,353
						Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420	5,582
						Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.366.670.063	0,309
						Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	161.686.125	0,021
						Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970	0,134
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	286.893.070	0,037
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	73,56	tahun	Program Pelayanan Kesehatan	180.181.934.986	23,520
						Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	98.000.827.211	12,792
						Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33.223.844.803	4,337
						Program Sumber Daya Kesehatan	10.577.132.139	1,381
						Program Kesehatan Masyarakat	4.351.312.880	0,568
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	0,58	persen	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	793.840.760	0,104

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
						Program Pemberdayaan Sosial	1.251.047.970	0,163
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	78,42	Angka (0-100)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	997.260.675	0,130
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	63,77	persen	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	306.725.460	0,040
						Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	4.670.797.180	0,610
6	Terkendalnya tingkat pengangguran terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,4-3,0	persen	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.150.267.600	0,281
						Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	234.131.165	0,031
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,33	angka (0-100)	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	221.643.700	0,029
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	Program Keluarga Berencana	7.463.665.665	0,974
						Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	249.376.660	0,033
<b>B</b>	<b>MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>							
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	IKLH	72,12	angka (0-100)	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	726.177.210	0,095
						Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	85.204.910	0,011
						Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	10.799.791.450	1,410
						Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.277.307.000	0,297
						Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	747.099.930	0,098
9	Meningkatnya cakupan	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur	67,74	persen	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	5,394

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	layanan infrastruktur		Wilayah			Program Peningkatan Layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	1,078
						Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	1,237
						Program Pengembangan sarana dan prasarana ke-PU-an	1.904.473.125	0,249
						Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	1,342
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	815.233.250	0,106
						Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	665.058.905	0,087
						Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	22.694.077.380	2,962
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	4.868,86	milyar rupiah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.142.000	0,006
						Program Pemberdayaan Usaha Mikro	197.037.000	0,026
						Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	192.510.000	0,025
						Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.345.546.000	0,437
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	186.538.470	0,024
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.373,16	milyar rupiah	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.215.047.600	0,159
						Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	463.033.100	0,060
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.248.628.830	0,163
						Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	531.587.498	0,069
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.431.144.605	0,839

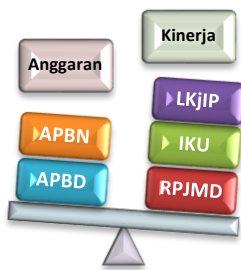


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
						Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	286.298.630	0,037
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.808.882.929	0,236
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	756.085.080	0,099
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	7.648,60	milyar rupiah	Program Pengembangan industry	216.440.600	0,028
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.523,19	milyar rupiah	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	8.213.170.264	1,072
						Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	139.106.076	0,018
		17	Pertumbuhan Investasi	5	persen	Program Pelayanan Investasi	20.793.040	0,003
						Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	37.744.500	0,005
						Program Pelayanan Perijinan	333.550.000	0,044
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	86,42	persen	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.808.697.000	0,367
						Program Penegakan Perda	252.696.000	0,033
						Program Penanggulangan Kebakaran	7.885.458.000	1,029
						Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	368.700.900	0,048
						Program Penanggulangan Bencana	2.938.216.690	0,384
		19	Indeks Desa Membangun	0,68	angka (0-1)	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895	0,141
						Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	444.410.015	0,058
						Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1.818.863.071	0,237

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3	4	5	6	6	8	
<b>C</b>	<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>							
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	63,03 (B)	angka (0-100) (huruf)	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	60.668.980	0,008
						Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	136.465.200	0,018
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.301.886.200	0,300
						Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	424.018.510	0,055
						Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.292.359.000	0,169
						Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	873.041.500	0,114
						Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	202.835.020	0,026
						Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	332.829.200	0,043
						Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	290.483.200	0,038
						Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	596.523.500	0,078
						Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	768.199.800	0,100
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	19.335.571.680	2,524
						Program Pelayanan Publik Kecamatan	218.335.982	0,029
						Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8.191.343.245	1,069
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.500.475.580	0,196
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	0,124

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	0,037
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	0,024
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	0,055
						Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	0,051
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,31 – 2,50	angka (0-5)	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.448.380.400	0,581
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	378.981.900	0,049
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.534.287.225	0,200
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	57.096.850	0,007
						Program Persandian	464.424.000	0,061
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	WTP	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.954.608.845	0,777
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.501.900.190	0,588
						Program Pengelolaan Aset Daerah	3.821.262.419	0,499
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	angka (0-100)	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	0,597
						Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	0,059
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	0,105
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	0,55	angka (0-1)	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	1.220.088.142	0,159
						Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.233.899.106	0,161
						Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	309.123.125	0,040
<b>Jumlah :</b>							<b>766.081.695.405</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2020 , data diolah



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

### AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi.
- 3.2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Analisis Efisiensi
- 3.4. Prestasi

### 3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:






$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (\*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.  
Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

### 3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja persasaran strategis pada tahun 2020 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antar capaian kinerja dan target kinerja tahun 2020 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2024, hasil analisis sebagai berikut:



Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Pada Indikator Tujuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>											
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,34	69,34	69,58	69,87	100,42	70,57	99,01
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi *)	persen	2,5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	137,60	2,5-4,0	137,60
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.262,68	9.262,68	9.400,64	9.301,000	98,94	10.400,12	89,43
		4	Angka Kemiskinan *)	persen	10,08-11,08	10,08-11,08	9,43-10,43	11,27	88,19	6,83-7,83	34,99
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,91	92,91	93,21	91,81	99,68	94,41	99,68
<b>B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>											
4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5-5,5	5-5,5	5,1-5,6	-1,68	-30,00	5,5-6,0	-28,00
		7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,20	25,20	26,70	24,94	93,41	32,72	76,22
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86	66,86	69,93	66,86**)	95,61	83,29	80,27
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>											
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	95,77	95,77	95,77	95,77	95,77	95,77	72,39	95,77	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja :</b>								<b>85,02</b>		<b>76,11</b>	

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, tahun 2021.

Keterangan :

\*) Indikator Negatif

\*\*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar/ada.

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian rata-rata kinerja tujuan pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2020 telah tercapai **85,02%** dengan kriteria **Tinggi**, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja tujuan telah tercapai **76,11%** dengan kriteria **Sedang**, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis belum tercapai, baik pada target tahun 2020 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2024. Pada capaian kinerja tujuan tahun 2020 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dengan kriteria sangat rendah bahkan minus yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki capaian kinerja rendah dengan capaian terhadap target kinerja -30,00%. Sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang tidak mencapai target dengan kriteria sangat rendah yaitu: Angka Kemiskinan (34,99%) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (-28,00%)

Secara umum capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020. Dari 5 Sasaran dengan 9 indikator, baru 2 indikator yang telah mencapai target. Demikian juga dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan dengan capaian  $\leq 75\%$ . Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020 pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Pada Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>											
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,72	7,72	7,86	7,78	98,98	8,41	92,51
		2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,67	12,67	12,76	12,54	98,28	13,27	94,50
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,89	93,89	94,41	97	102,74	95,94	101,10
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,52	73,56	73,72	100,22	73,75	99,96
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58	0,58	0,63	108,62	0,58	108,62
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,51	79,51	78,42	79,51**)	101,39	82,62	101,39
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	58,89	58,89	63,77	67,73	106,21	95,81	70,69
6	Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *)	persen	2,4-3,0	2,4-3,0	2,4-3,0	4,27	57,67	2,25-2,55	32,55
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,03	69,03	69,33	69,03**)	99,57	70,53	97,87
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	madya	Nindya	Nindya**)	100,00	utama	100,00
<b>B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>											
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	72,10	72,10	72,12	71,3	98,86	72,20	98,75
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,63	61,63	67,74	69,9	103,19	94,38	74,06
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.529,30	4.529,30	4.868,86	4.306,14	88,44	6.227,11	69,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.997,70	6.997,70	7.373,16	6.914,81	93,78	8.875,03	77,91
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.157,40	7.157,40	7.648,60	7.264,81	94,98	9.613,39	75,57
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1.416,24	1.523,19	1.416,24	92,98	1.951,00	72,59
		17	Pertumbuhan Investasi	persen	5,00	5,00	5,00	13,00	260,00	5,00	260,00
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	81,38	81,38	82,20	83,44	101,51	87,76	95,08
		19	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,67	0,67	0,68	0,688	101,18	0,72	95,56
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>											
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	60,10(B)	60,10(B)	63,03 (B)	60,10(B)**)	95,35	71,00 (BB)	84,65
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,19-2,30	2,19-2,30	2,31 – 2,50	2,94	117,60	2,86-3,1	94,84
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP**)	100,00	WTP	100,00
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,74	82,74	83,00	83,69	100,83	86,00	97,31
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,49	0,49	0,55	0,6***)	109,09	0,71	84,51
<b>Rata-rata Capaian Kinerja :</b>									<b>105,48</b>		<b>94,97</b>

Sumber : Perangkat Daerah terkait data diolah, tahun 2021.

Keterangan :

\*) Indikator Negatif

\*\*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar/ada, atau tidak keluar lagi

\*\*\*) Capaian sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2020 telah melampaui target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,48% dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran telah tercapai 94,97% dengan kriteria sangat tinggi. Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2020 sedangkan target akhir periode RPJMD pada tahun 2024 hampir mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut belum bisa menunjukkan kinerja yang bagus karena masih terdapat capaian indikator yang melebihi 200%, hal ini dimungkinkan karena penentuan target kinerja yang terlalu rendah pada awal penyusunan RPJMD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis diperlukan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja, jumlah anggaran dan realisasi per program dalam menunjang tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020 secara detail pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran Per Program  
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020

No	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
A	Urusan Pendidikan			
1	Program Pendidikan Sekolah Dasar	103.306.463.888	28.490.122.515	27,58
2	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.969.111.203	22.172.226.379	47,21
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760	2.252.413.213	83,20
4	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420	40.383.214.570	94,44
B	Urusan Kesehatan			
1	Program Pelayanan Kesehatan	180.181.934.986	141.775.741.956	78,68
2	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	98.000.827.211	88.575.666.926	90,38
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33.223.844.803	27.884.428.452	83,93
4	Program Sumber Daya Kesehatan	10.577.132.139	9.164.849.309	86,65
5	Program Kesehatan Masyarakat	4.351.312.880	3.593.536.194	82,59
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	36.024.716.837	87,18
2	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	5.635.379.163	68,23
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	8.882.067.735	93,76
4	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.904.473.125	1.835.912.748	96,40
5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	5.667.244.281	55,14
D	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	306.725.460	302.977.861	98,78



No	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	4.670.797.180	4.581.164.598	98,08
E	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.808.697.000	2.782.434.807	99,06
2	Program Penegakan Perda	252.696.000	236.466.000	93,58
3	Program Penanggulangan Kebakaran	7.885.458.000	7.818.937.840	99,16
4	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	368.700.900	265.342.510	71,97
5	Program Penanggulangan Bencana	2.938.216.690	2.757.253.625	93,84
F	Urusan Sosial			
1	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	793.840.760	768.339.681	96,79
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.251.047.970	1.201.990.215	96,08
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			
G	Urusan Tenaga Kerja			
1	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.150.267.600	2.015.570.812	93,74
2	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	234.131.165	233.199.700	99,60
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	221.643.700	219.866.714	99,20
I	Urusan Pangan			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	997.260.675	967.196.700	96,99
J	Urusan Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	726.177.210	716.003.196	98,60
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	85.204.910	83.364.422	97,84
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	10.799.791.450	8.695.737.414	80,52
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.277.307.000	2.212.773.152	97,17
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	747.099.930	744.919.302	99,71
K	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			
1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	4.508.062.202	98,60
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	436.919.170	97,29
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	740.784.462	92,20
L	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895	1.011.389.500	93,46
2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	444.410.015	437.586.103	98,46
3	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1.818.863.071	1.535.680.158	84,43
M	Urusan Pengendalian Penduduk dan			

No	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Keluarga Berencana			
1	Program Keluarga Berencana	7.463.665.665	5.881.606.165	78,80
2	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	249.376.660	248.276.620	99,56
N	Urusan Perhubungan			
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	815.233.250	782.404.421	95,97
2	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	665.058.905	636.593.407	95,72
3	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	22.694.077.380	22.063.979.514	97,22
O	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.448.380.400	4.219.929.442	94,86
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	378.981.900	356.432.000	94,05
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.534.287.225	1.436.511.209	93,63
P	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.142.000	48.141.150	100,00
2	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	197.037.000	196.769.386	99,86
Q	Urusan Penanaman Modal			
1	Program Pelayanan Investasi	20.793.040	20.682.840	99,47
2	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	37.744.500	35.449.115	93,92
3	Program Pelayanan perijinan	333.550.000	330.093.467	98,96
R	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.366.670.063	2.262.492.713	95,60
2	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	161.686.125	146.735.985	90,75
S	Urusan Statistik			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	57.096.850	55.849.850	97,82
T	Urusan Persandian			
1	Program Persandian	464.424.000	439.998.792	94,74
U	Urusan Kebudayaan			
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970	996.319.124	96,81
V	Urusan Perpustakaan			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	286.893.070	275.682.197	96,09
W	Urusan Kearsipan			
1	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	60.668.980	60.491.380	99,71
2	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	136.465.200	136.104.465	99,74
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
X	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.215.047.600	1.162.427.260	95,67
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	463.033.100	458.496.020	99,02
Y	Urusan Pariwisata			
1	Program Peningkatan Sarana	8.213.170.264	5.829.865.902	70,98

No	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Prasarana dan Industri Pariwisata			
2	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	139.106.076	138.528.893	99,59
Z	Urusan Pertanian			
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.248.628.830	1.180.224.309	94,52
2	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	531.587.498	453.932.700	85,39
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.431.144.605	6.117.084.872	95,12
4	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	286.298.630	285.665.880	99,78
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.808.882.929	1.764.294.683	97,54
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	756.085.080	752.734.281	99,56
AA	Urusan Perdagangan			
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	192.510.000	190.809.715	99,12
2	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.345.546.000	2.950.390.221	88,19
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian	186.538.470	185.721.936	99,56
AB	Urusan Perindustrian			
1	Program Pengembangan industri	216.440.600	202.910.082	93,75
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>			
AC	Urusan Administrasi Pemerintahan			
1	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	290.483.200	288.547.243	99,33
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	424.018.510	416.723.850	98,28
3	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	202.835.020	194.528.250	95,90
4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	1.625.188.200	1.587.119.179	97,66
5	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	596.523.500	578.542.470	96,99
6	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	873.041.500	708.907.500	81,20
7	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	768.199.800	766.120.775	99,73
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.301.886.200	1.921.356.816	83,47
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	19.335.571.680	12.071.820.926	62,43
10	Program Pelayanan Publik Kecamatan	218.335.982	202.656.445	92,82
11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8.191.343.245	8.137.178.403	99,34
AD	Urusan Pengawasan			
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.500.475.580	1.415.066.070	94,31
AE	Urusan Perencanaan			

No	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	920.675.161	96,91
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	274.083.085	97,84
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	160.837.480	87,81
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	398.200.124	95,19
AF	Urusan Keuangan			
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.954.608.845	5.646.007.933	94,82
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.501.900.190	3.707.193.523	82,35
3	Program Pengelolaan Aset Daerah	3.821.262.419	2.926.090.024	76,57
AG	Urusan Kepegawaian			
1	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	1.220.088.142	1.206.153.031	98,86
2	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.233.899.106	1.029.810.429	83,46
3	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	309.123.125	303.633.825	98,22
AH	Urusan Penelitian dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	389.391.275	98,80
<b>Sub Jumlah :</b>		<b>766.081.695.405</b>	<b>575.165.754.235</b>	<b>75,08</b>
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	65.322.610.019	36.433.005.023	55,77
2	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.464.433.254	3.336.863.668	96,32
<b>Sub Jumlah :</b>		<b>68.787.043.273</b>	<b>39.769.868.691</b>	<b>57,82</b>
<b>Total Anggaran :</b>		<b>834.868.738.678</b>	<b>614.935.622.926</b>	<b>73,66</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, data realisasi keuangan diolah kondisi 2 Pebruari 2021 unaudited. 2021

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai rata-rata **73,66%** dengan kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,38% jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,04%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% % ≤ 100%) sebanyak 71 (73,96%) program, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun lalu dengan realisasi program tertinggi sebesar 111 (72,08%). Capaian program Sangat Rendah pada kategori sedang (≤ 50%) sebanyak 2 (2,08%) program, jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 0,97%, dengan realisasi sebanyak 5 (3,25%) program, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan perbaikan. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2020 sebanyak 71 program sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 111 program sehingga berkurang sebesar 36,04%, hal ini menunjukkan efisiensi dalam penganggaran. Secara

detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program  
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	71 (73,96%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	19 (19,79%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	2 (2,08%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	2 (2,08%)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	2 (2,08%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2020, data diolah.

### 3.2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2020, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2020 terhadap indikator makro berjumlah 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain Indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 15 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun I (kesatu) dari RPJMD Kabupaten Megelang 2019-2024.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 masih terdapat penggunaan data sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

#### 3.2.1. Evaluasi Tujuan Strategis

##### 3.2.1.1. Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil pencapaian indikator sebagai dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya  
Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,34	69,58	69,87	100,42	70,57	99,01
<b>Persentase Capaian Kinerja Tujuan:</b>						<b>100,42</b>		<b>99,01</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia tahun 2020 sebesar 69,87 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,42% (sangat baik), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 99,01% (sangat baik).

Pada tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia diukur dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Magelang mencapai 69,87, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,43 dari tahun 2019 yang sebesar 69,58. IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah (71,87) maupun Nasional (71,92), data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,33	73,39	73,47	73,56	73,72
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,47	12,48	12,53	12,54
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,40	7,41	7,57	7,77	7,78
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rp	8.501	8.627	9.025	9.387	9.301
IPM Kabupaten Magelang		67,85	68,39	69,11	69,87	69,87
IPM Provinsi Jawa Tengah		69,98	70,52	71,12	71,73	71,87
IPM Nasional		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2021

Jika disandingkan kabupaten/kota lain se eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 8  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota  
eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kabupaten Purworejo	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68
Kabupaten Wonosobo	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22
Kabupaten Magelang	67,85	68,39	69,11	69,87	69,87
Kabupaten Temanggung	67,6	68,34	68,83	69,56	69,57
Kota Magelang	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99

Sumber : BPS Jawa Tengah , 2021

### 3.2.1.2. Tujuan Strategis : Meningkatkan Paritas Daya Beli Masyarakat

Pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat diukur dalam 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu : Inflasi, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dan Angka Kemiskinan.

Berikut capaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat:

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatkan Paritas  
Daya Beli Masyarakat tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Inflasi <sup>*)</sup>	persen	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	137,60	2,5-4,0	137,60
2 Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.262,68	9.400,64	9301	98,94	10.400,12	89,43
3 Angka Kemiskinan <sup>*)</sup>	persen	10,08-11,08	9,43-10,43	11,27	88,19	6,83-7,83	34,99
<b>Persentase Capaian Kinerja Tujuan:</b>					<b>108,24</b>		<b>87,34</b>

Sumber : BPS kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*) Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2020 sebesar 108,24% (sangat tinggi) dan dapat melalui target kinerja pada tahun tersebut, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 87,34% (tinggi).

Inflasi menjadi tolok ukur stabilitas perekonomian daerah suatu daerah. Laju inflasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 tidak dikeluarkan oleh BPS, karena penghitungan laju inflasi dilakukan di tingkat provinsi. Laju inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10  
Inflasi Kabupaten Magelang  
Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kabupaten Magelang	%	2,86	3,47	2,66	2,12	1,56
Inflasi Provinsi Jawa Tengah	%	2,36	3,71	2,83	2,81	1,56
Inflasi Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 meningkat 14,73%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 3,68% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 2,95% per tahun nasional 2,83% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah, secara detail pada tabel berikut:

Tabel 3.11  
Pengeluaran Riil Per Kapita  
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	8.501	8.627	9.025	9.387	9.301
Provinsi Jawa Tengah	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930
Nasional	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin pada tahun 2020 adalah:

- a. Adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak bulan Maret 2020, yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi.
- b. Database kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan *stakeholder* yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- d. Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya pekerja buruh dan kaum petani.

Capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 3.12  
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang  
Tahun 2016-2020

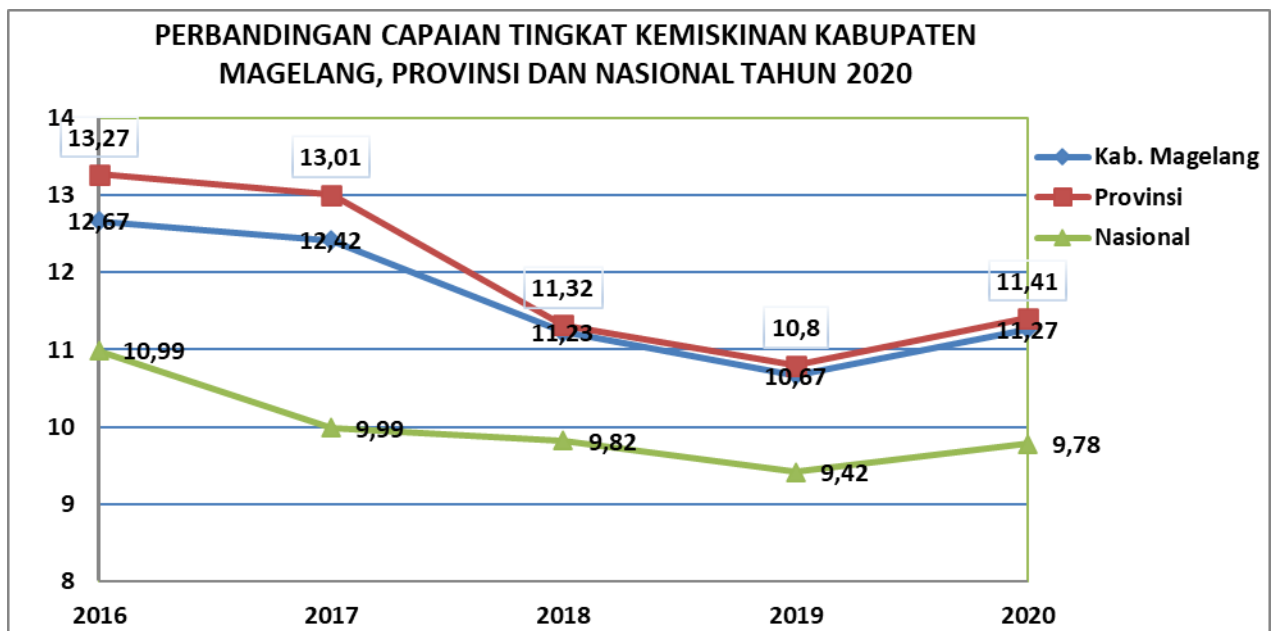
Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	271.800	281.237	296.327	325.921	342.430
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	158,86	157,15	143,44	137,45	146,34
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	12,67	12,42	11,23	10,67	11,27
Persentase Jumlah Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	87,33	87,58	88,77	89,33	88,73
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,44	0,34	0,34	0,17	0,20
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,84	1,67	1,55	0,98	1,23

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp.271.800,- pada tahun 2016 menjadi Rp.342.430,00 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,67% atau sebesar 158.860 jiwa, selama lima tahun terakhir bisa diturunkan menjadi 11,27% atau sebesar 146.340 jiwa walaupun penurunan angka kemiskinan agak landau pada tahun 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dari 1,84 pada tahun 2016 turun menjadi 1,23 pada tahun 2020. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menunjukkan tren penurunan, dari 0,44 pada tahun 2016 menjadi 0,20 pada tahun 2020.

Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, selama 5 (lima) tahun terakhir indikator kemiskinan, khususnya persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun secara umum mengalami kenaikan dengan adanya pandemi *Covid-19*. Pada periode Maret tahun 2020, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,41%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,78 %). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Gambar 3.1  
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan  
Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2016-2020

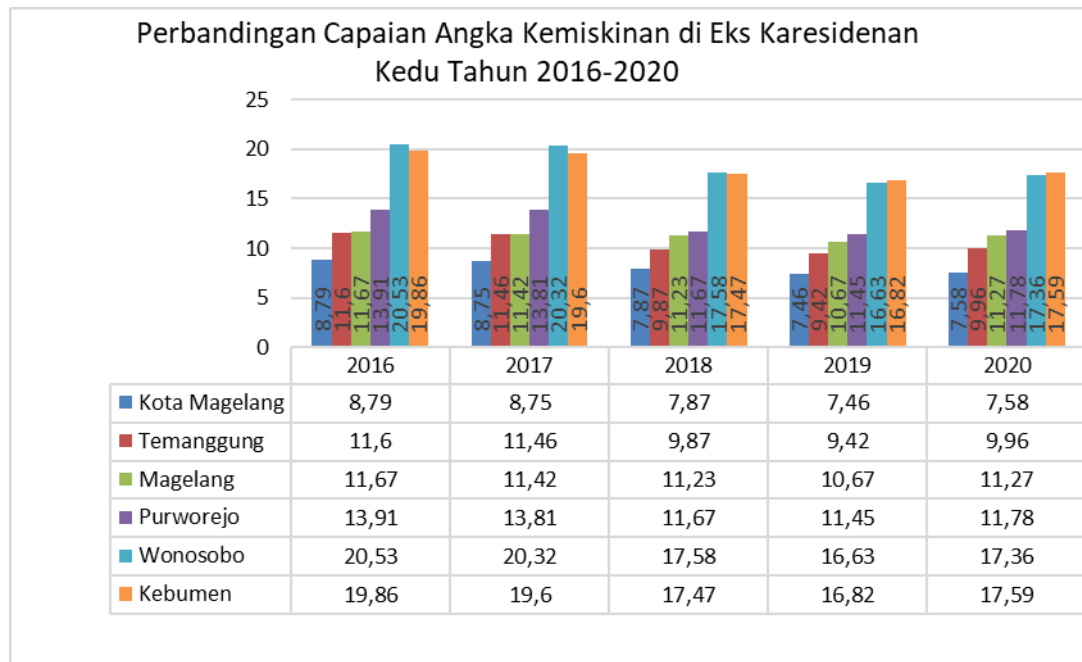
Persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan, tetapi kembali mengalami kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2020. Demikian juga yang terjadi pada capaian provinsi dan nasional tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan, baik yang terjadi di Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional merupakan hasil survei BPS yang dilakukan pada bulan Maret 2020. Hasil survei menunjukkan data kemiskinan di level makro. Meskipun kasus *Covid-19* pertama di Indonesia baru terjadi pada awal Maret, tetapi tekanan terhadap perekonomian pada Kuartal I tahun 2020 sangat kuat, tekanan tersebut terdiri dari:

1. Tekanan di sektor produksi akibat ketergantungan industri pada bahan baku impor dan turunnya ekspor, yang sudah dirasakan sejak Januari 2020 dan perlahan diikuti dengan rasionalisasi jumlah tenaga kerja.
2. Terjadi perubahan ekspektasi masyarakat menghadapi ketidakpastian pandemi *Covid-19*, terutama dengan menahan *spending* dan mengatur *saving*.
3. Terjadi pembatasan kegiatan masyarakat.

Proses *circular* tersebut menyebabkan adanya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada bulan Maret 2020 sudah dirasakan cukup besar, meskipun penyebaran (*outbreak*) *Covid-19* sendiri belum luas.

Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2020 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga di atas capaian

Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dan ditunjukkan warna hijau. Selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

**Gambar 3.2**  
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota  
di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Dari data di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2016-2019 angka kemiskinan di Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kedu mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2020 hampir semua mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan angka kemiskinan diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia mulai awal tahun 2020.

Pandemi virus corona yang terjadi pada tahun 2020 memukul perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang hanya dalam waktu beberapa bulan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hingga Maret 2020 antara lain: terjadinya perlambatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2020. Selain itu, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 yang mencapai 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus *Covid-19* pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020.

Pada periode September 2019–Maret 2020 secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78 persen), daging ayam ras (5,53 persen), minyak goreng (7,06 persen), gula pasir (13,35 persen), dan telur ayam ras (11,10 persen). Meski rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019 sampai dengan Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen namun



peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang sebesar 3,20 persen. Pada Maret 2019 Susenas BPS menunjukkan penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang. Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* dapat memutarbalikkan tren penurunan angka kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir, selama 5 (lima) tahun terakhir, yang sebelumnya pada angka 2,75% atau rata-rata 0,55% setiap tahunnya pada periode 2015-2019, namun dengan adanya pandemi *Covid-19* pada Tahun 2020 selama lima tahun terakhir pada tahun 2016-2020 penurunan angka kemiskinan menjadi melambat, yaitu sebesar 1,4%, atau 0,28% setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, dari 137.450 jiwa pada Tahun 2019, menjadi 146.340 jiwa pada Tahun 2020, atau mengalami penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 8.890 jiwa.

Diperkirakan pada tahun 2022 masih akan terjadi perlambatan penurunan penduduk miskin di Kabupaten Magelang, mengingat adanya potensi masyarakat yang rentan miskin dan hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Adanya PHK masal dan kelesuan beberapa sektor ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akan menjadi faktor utama penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022 diperkirakan target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,65% tidak akan tercapai. Guna menjaga jumlah penduduk miskin Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui refocusing belanja dalam APBD 2022 untuk diarahkan mengatasi dampak *Covid-19*, antara lain melalui strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang difokuskan untuk warga yang langsung terdampak pandemi *Covid-19*. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat *Covid-19*. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat di luar data DTKS yang terdampak *Covid-19* baik langsung ataupun tidak langsung.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan pandemi *Covid-19* yang telah dilakukan melalui dalam menangani kemiskinan yaitu melalui upaya Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Penanganan Dampak Ekonomi (JPE) sebagai berikut:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*

- a. Bantuan program sembako untuk penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan program sembako.

- c. Bantuan Sosial Tunai bagi penduduk Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) berdasarkan usulan desa/kelurahan, yang terkena dampak Covid-19.
2. Penanganan dampak ekonomi
    - a. Pemberian sembako ataupun kompensasi penurunan omzet yang mengakibatkan penurunan pendapatan kepada UKM.
    - b. Padat Karya kepada pelaku pariwisata terdampak Covid-19 yang diusulkan oleh Disparpora Kabupaten Magelang.
    - c. Restrukturisasi dan *Reschedule* pembayaran kredit bagi UMKM di Kabupaten Magelang
    - d. Pemesanan produk alat kesehatan seperti APD, *handsanitizer*, desinfektan dan masker kain pada pelaku usaha lokal.
    - e. Pembelian produk UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang nantinya akan dijadikan salah satu komponen barang hibah/bansos bagi warga masyarakat.
    - f. Memberikan keringanan retribusi pasar kepada para pedagang.
    - g. Memberikan fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya.

### 3.2.1.3. Tujuan Strategis : Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender

Pada tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks pembangunan gender. Capaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya  
Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,91	93,21	91,81	99,68	94,41	98,73
<b>Persentase Capaian Kinerja Tujuan:</b>						<b>99,68</b>		<b>98,73</b>

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2020 sebesar 99,68% (sangat tinggi) dimana dapat melampaui target pada tahun yang bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,73% (sangat tinggi).

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100, Angka tersebut

ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Secara umum IPG di Kabupaten Magelang mengalami tren yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,91 tahun 2015, namun mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, tetapi capaian pembangunan gender di Kabupaten Magelang masih lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional.

Tabel 3.14  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Magelang	92,91	N/A	91,95	92,23	91,78
Provinsi Jawa Tengah	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89
Nasional	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2020

Pada tabel IPG di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender di Kabupaten Magelang cenderung menurun akan tetapi masih lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional. Kabupaten Magelang ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

#### 3.2.1.4. Tujuan Strategis : Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Cakupan infrastruktur wilayah berkelanjutan.

Capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah sebagai berikut:

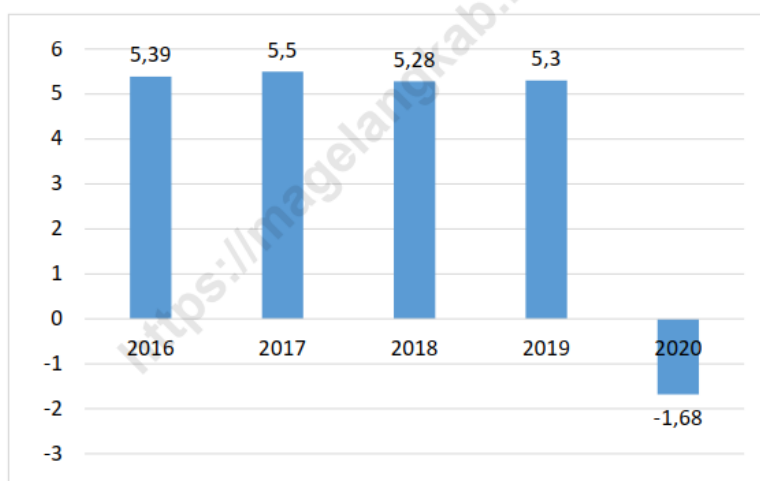
Tabel 3.15  
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya  
Daya Saing Daerah tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5-5,5	5,1-5,6	-1,68	-30,00	5,5-6,0	-28,00
2	PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,20	26,70	24,94	93,41	32,72	76,22
3	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86	69,93	66,86**)	95,61	83,29	80,27
<b>Persentase Capaian Kinerja Tujuan:</b>						<b>53,01</b>		<b>42,83</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah pada tahun 2020 sebesar 53,01% (rendah), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 42,83% (sangat rendah). Rendahnya capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah dikarenakan indikator laju pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, hal ini dikarenakan kondisi *Covid-19* menyebabkan laju pertumbuhan mengalami kemerosotan yang sangat tajam, hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 3.3  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar  
Harga Konstan 2020 (Persen) Pada Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar tersebut pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi. Hal ini bisa dilihat dari angka laju pertumbuhan PDRB yang hanya sebesar -1,68 persen, angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2019. Pertumbuhan ini menurun cukup tajam dikarenakan rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat dengan adanya pandemik *Covid-19*, yang melumpuhkan sistem perekonomian seluruh dunia.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan.

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk. Komponen/unsur pembentuk cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi: cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan. Sedangkan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan dibentuk oleh komponen/unsur: persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Di bawah ini, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2016-2020.

Tabel 3.16  
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah  
Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	N/A	53,06	57,83	62,80	66,86
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	N/A	54,93	55,27	60,05	53,89
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	N/A	54,00	56,55	61,43	61,43*)

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2021

Catatan : \*) data sementara

3.2.1.5. Tujuan Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	63,82	65,53	62,76**)	95,77	72,39	95,77
<b>Persentase Capaian Kinerja Tujuan:</b>						<b>95,77</b>		<b>95,77</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum tersedia.

Dikarenakan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 dari Kemenpan RB belum keluar, maka data capaian mengacu pada hasil penilaian tahun 2019. Pada tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Tujuan Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel pada tahun 2020 sebesar 95,77% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 95,77% (sangat tinggi).

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang baru keluar dua kali, yaitu pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dan pada tahun 2019 mendapat nilai 62,78.



### 3.2.2. Evaluasi Sasaran Strategis

3.2.2.1. Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1 Rata-rata Lama	tahun	7,72	7,86	7,78	98,98	8,41	92,51
		2 Harapan Lama	tahun	12,67	12,76	12,54	98,28	13,27	94,50
		3 Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,89	94,41	97	102,74	95,94	101,10
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>100,00</b>		<b>96,04</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan pada tahun 2020 sebesar 100% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 96,04% (sangat tinggi).

Pada tahun 2020 Rata-rata lama sekolah Kabupaten Magelang mencapai 7,78 tahun, atau setara dengan SMP kelas 2. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari secara nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	7,40	7,41	7,57	7,77	7,78
Provinsi Jawa Tengah	7,16	7,24	7,73	7,53	7,69
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Perkembangan Harapan lama sekolah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sebesar 12,54 tahun atau setara dengan SMA/SMK kelas 1. Sejak tahun 2014 Harapan lama sekolah Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,48 (2018). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional.

Tabel 3.20  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	12,15	12,47	12,48	12,53	12,45
Provinsi Jawa Tengah	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70
Nasional	12,72	12,87	12,91	12,95	12,98

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Penghargaan yang didapatkan Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan adalah Penghargaan sebagai Perpustakaan Kabupaten/Kota terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



Gambar 3.4 Penghargaan Perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan Rp.199.589.458.499 dengan realisasi sebesar Rp.96.979.206.696 (48,59%), realisasi sangat rendah dikarena realisasi anggaran belum selesai diinput.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan terdiri dari:

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
6. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

3.2.2.2. Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.21  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya  
Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,56	73,72	100,22	73,75	99,96
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>100,22</b>		<b>99,96</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 100,22% (sangat tinggi) dan dapat melampaui target yang ditetapkan di tahun bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 99,96% (sangat tinggi).

Pada 2020 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 73,72 mengalami kenaikan sebesar 0,39 dari tahun 2016 yang sebesar 73,33. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang di atas pertumbuhan UNH Provinsi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan UNH Nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22  
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	73,33	73,39	73,47	73,56	73,72
Provinsi Jawa Tengah	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37
Nasional	70,90	71,06	71,2	71,34	71,47

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya pandemi *Corona Virus Disease 19* pada awal tahun 2020 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Magelang. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya sektor kesehatan saja, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Kasus *Covid-19* sampai sekarang belum mengalami penurunan, malah memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Jumlah kasus *Covid-19* sampai akhir tahun 2020 di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23  
Jumlah Kasus *Corona Virus Disease – 19*  
Kabupaten Magelang, Sampai dengan 31 Desember 2020

Status Pasien	Jumlah Kasus				
	<b>Suspek</b> 1.046 kasus	Dirawat	Isolasi	Meninggal	Selesai Isolasi
	71	31	0	43	901
<b>Probable</b> 114 kasus	Dirawat		Sembuh		Meninggal
	0		0		114
<b>Konfirmasi</b> 6.001 Kasus	Dirawat/ Isolasi Mandiri		Sembuh		Meninggal
	1.448		4.408		145
<b>Jumlah Kasus meninggal :</b>					<b>269</b>

Sumber : Info Grafis Website Satgas Covid-19 Kabupaten Magelang (<http://beritamagelang.id/infografis/infografis-covid-19-kamis-31-desember-2020>), 2021

Bersarkan tabel di atas jkasus meninggal dunia terkonfirmasi *Covid-19* di Kabupaten Magelang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 145 orang, sedangkan jumlah kematian *Covid-19* baik dalam kondisi *suspek*, *probable* dan terkonfirmasi positif berjumlah 269 orang. Perbandingan kasus *covid-19* di Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah dibandingkan dengan kasus nasional sebagai berikut:

Tabel 3. 24  
Jumlah Kasus *Corona Virus Disease – 19*  
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Magelang  
Sampai dengan 31 Desember 2020

Wilayah	Jumlah Kasus			
	Konfirmasi	Dirawat/ Isolasi Mandiri	Sembuh	Meninggal
Kabupaten Magelang	6.001 (0,44%)	1.448 (0,19%)	4.408 (0,72%)	145 (0,65%)
Jawa Tengah	93.030 (6,76%)	10.165 (1,37)	77.136 (12,62)	5.729 (25,88%)
Nasional	1.376.433	743.198	611.097	22.138.

Sumber : Website Satgas Covid – 19 Nasional, 2021

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Magelang menyumbang 0,44% kasus konfirmasi positif *Covid-19* dan menyumbang 0,65% kasus kematian *Covid-19*, angka tersebut cukup tinggi secara nasional.

Untuk menangani dampak pandemi *Covid-19* di bidang kesehatan maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *surveilans* penyakit menular yang berpotensi KLB serta penanganan krisis kesehatan
2. Pengadaan perbekalan kesehatan (BMHP) dan reagensia
3. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
4. Pengobatan bagi penderita *Covid-19*

5. Penegakan protokol kesehatan pada berbagai sektor dengan melibatkan sektor terkait.
6. Promosi Kesehatan (melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, sosialisasi karakteristik virus, penyebarannya dan penularannya, *social* dan *physical distancing*).
7. Pembentukan Satgas Covid-19 sampai level desa dan dusun, sebagai bentuk peran serta masyarakat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan Rp.326.335.052.019 dengan realisasi sebesar Rp.270.994.222.837 (83,04%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri :

1. Program Pelayanan Kesehatan
2. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Program Sumber Daya Kesehatan
5. Program Kesehatan Masyarakat

### 3.2.2.3. Sasaran Strategis : Menurunnya jumlah PMKS

Capaian kinerja sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya  
Jumlah PMKS Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Menurunnya jumlah PMKS	1 Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58	0,63	108,62	0,58	108,62
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>108,62</b>		<b>108,62</b>

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 108,62% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 108,62% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kecenderungan naik. Dari 40.016 orang pada tahun 2016, menjadi 143.179 orang pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup tajam ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2016-2020, persentase PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 26  
Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PMKS yang tertangani	Orang	40.016	38.001	79.069	67.715	143.179
2.	PMKS yang ada	Orang	131.222	131.222	170.684	136.993	136.993
3.	Penanganan PMKS	%	30,49	28,95	46,32	42,13	104,52

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajauan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru. Adapun kenaikan penanganan PMKS yang cukup tajam pada tahun 2020 menjadi di atas 100% diakibatkan karena jumlah yang dilayani jauh lebih banyak dari sasaran yang ada yang disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator kinerja persentase penurunan PMKS dan kategori kabupaten layak anak adalah:

- a. Tersedianya sumber daya yang memadai dalam penanganan PMKS di Kabupaten Magelang;
- b. Peran lintas sektor non pemerintahan dalam kontribusi dalam penanganan PMKS khususnya dari sisi pembiayaan;
- c. Adanya regulasi daerah yang mendukung pencapaian kabupaten layak anak berupa peraturan daerah dan peraturan bupati.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS sebesar Rp.2.044.888.730 dengan realisasi sebesar Rp.1.970.329.896 (96,35%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program Pemberdayaan Sosial

#### 3.2.2.4. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 27  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	77,37	78,42	79,51**)	101,39	82,62	101,39
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>101,39</b>		<b>101,39</b>

Sumber : Dinstan Pangan Kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah pada tahun 2020 sebesar 101,39% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 101,39% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah sebesar Rp.997.260.675 dengan realisasi sebesar Rp.967.196.700 (96,99%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terdiri dari:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

#### 3.2.2.5. Sasaran strategis : Meningkatkan layanan hunian yang layak dan berkualitas

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak Dan Berkualitas Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	1 Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	58,89	63,77	72,06	113,00	95,81	75,21
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>113,00</b>		<b>75,21</b>

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas pada tahun 2020 sebesar 113,00% (sangat tinggi) capaian kinerja tersebut melampaui target kinerja pada tahun yang bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 75,21% (tinggi).

Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pemutakhiran basis data terpadu 2015 yang di verifikasi dan validasi pada tahun 2018;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 3. 29  
Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penanganan RTLH	Unit	9.830	14.624	22.702	26.794	32.382*
2.	Jumlah RTLH Yang Harus Ditingkatkan (PBDT 2015)	Unit	66.273	66.273	65.830	65.830	65.830
3.	Jumlah PBDT yang mendapatkan bantuan RTLH	unit	-	1.957	3.499	3.151	3.564*
4.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	-	13	9	-	-
5.	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	-	13	11	-	-
6.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	276.071	277.495	291.398	310.722**	318.930
7.	Jumlah Rumah	Unit	336.610	337.246	349.150	341.893**	360.079
8.	Prosentase Rumah Layak Huni	%	82,02	82,28	83,46	90,88**	88,57

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

\*) data sementara

\*\*\*) sensus BPS 2019

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2008 sampai dengan 2020, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebanyak 26.794 unit, dengan sasaran masyarakat miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial/PPLS (2011-2015), Pemutakhiran Basis Data Terpadu/PBDT (2016-2017), dan PBDT 2015 terverifikasi (2018).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data *backlog* rumah di Kabupaten Magelang mencapai 55.735 unit. Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, belum satupun perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Sehingga pemerintah belum dapat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarannya.

Tabel 3. 30  
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	85,09	97,20	97,20	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani (Simulasi perhitungan pengurangan kumuh sesuai PermenPU 14/PRT/M/2018 )	Ha	13.91	NA	66.53	77,74	77,74
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	14.31	NA	68.45	77,79	77,79
4.	Luas Kawasan kumuh yg belum tertangani	Ha	71,18	NA	30,67	19,46	19,46
5.	Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani	%	85,09	NA	31,55	22,21	22,21

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No No. 188.45/498/KEP/25/2014 (tanggal 8 Desember 2014) sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Kemudian melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2020, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditunjukkan seperti pada tabel di atas.

Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana permukiman melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Salah satu PSU yang perlu dibangun seiring dengan tumbuhnya permukiman di Kabupaten Magelang, adalah tempat pemakaman umum

(TPU) yang dikelola oleh pemerintah. TPU ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU bagi warga pendatang atau warga yang tinggal di perumahan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas sebesar Rp.4.977.522.640 dengan realisasi sebesar Rp.4.884.142.459 (98,12%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas terdiri :

1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

### 3.2.2.6. Sasaran strategis : Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian kinerja sasaran strategis terkendalnya tingkat pengangguran terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 31  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <sup>1)</sup>	persen	2,4-3,0	2,4-3,0	4,27	57,67	2,25-2,55	32,55
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>57,67</b>		<b>32,55</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis terkendalnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 57,67% (rendah), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 32,55% (sangat rendah), rendahnya tingkat pengangguran tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana terjadi penutupan tempat usaha yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2020 mencapai 774.364 orang. tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 76,60 persen. Sedangkan tingkat pengangguran mencapai 4,27 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebesar 741.284 orang. Sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor jasa mampu menyerap hingga 305.138 pekerja atau 41,16% dari total penduduk yang bekerja. Sementara sektor manufaktur merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu hanya menyerap 203.251 pekerja atau sekitar 27,42%. Proporsi terbesar pada Agustus 2020 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 29,65%

atau 219.773 orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebesar 3,24%.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkendalanya tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp.2.384.398.765 dengan realisasi sebesar Rp.2.248.770.512 (94,31%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terkendalanya Tingkat Pengangguran Terbuka terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja

### 3.2.2.7. Sasaran strategis : Meningkatnya Keberdayaan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 33  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatnya keberdayaan gender	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,03	69,33	69,03**)	99,57	70,53	97,87
		2 Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	Nindya	Nindya**)	100,00	utama	100,00
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>99,78</b>		<b>98,94</b>

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender pada tahun 2020 sebesar 99,78% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,94% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut sesuai dengan target pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Angka IDG di Kabupaten Magelang selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif , secara detail dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 33  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang  
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2019
Kabupaten Magelang	N/A	62,43	71,21	67,74	91,81
Provinsi Jawa Tengah	74,89	75,10	74,03	72,18	-
Nasional	71,39	71,74	72,10	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2020

Berdasarkan tabel di atas angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami fluktuatif, angka IDG tersebut menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja indeks pemberdayaan gender adalah:

- a. masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- b. belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan;
- c. tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki;
- d. masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender Rp.7.934.686.025 dengan realisasi sebesar Rp.6.349.749.499 (80,03%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan keberdayaan gender terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Pembangunan Ketahanan Keluarga

### 3.2.2.8. Sasaran strategis : Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik

Capaian kinerja sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 34  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPJMD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	72,10	72,12	71,3	98,86	72,2	98,75
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>98,86</b>		<b>98,75</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik pada tahun 2020 sebesar 98,86% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,75% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.



Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang. Kualitas lingkungan hidup dilihat melalui indeks kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan, dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 35  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2020

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62	50,77	56,15
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82	84,19	87,03
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74	76,74	68,24
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93	76,18	71,30

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Indeks kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Sementara (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, penyebab terjadinya emisi GRK dikelompokkan menjadi tiga sektor yaitu penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Emisi GRK pada tahun 2017 di Kabupaten Magelang tertinggi berasal dari kegiatan pengadaan dan penggunaan energi untuk kegiatan transportasi sebesar 531.600 ton CO<sub>2</sub>e (61%) dan emisi terendah adalah dari pengelolaan limbah yaitu sebesar 71.040 ton CO<sub>2</sub>e (8%).

Kabupaten Magelang pada tahun 2020 memperoleh Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Magelang

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik Rp.14.635.580.500 dengan realisasi sebesar Rp.12.452.797.486 (85,09%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik terdiri dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup



Gambar 3. 5 Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

3. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah
4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

3.2.2.9. Sasaran strategis : Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 36  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	1 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,63	67,74	69,9	103,19	94,38	74,06
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>103,19</b>		<b>74,06</b>

Sumber : DPUPR, DPRKP dan DISHUB Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur pada tahun 2020 sebesar 103,19% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 74,06% (sedang).

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk. Komponen/unsur pembentuk cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi: Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan. Sedangkan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan dibentuk oleh komponen/unsur: persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;

persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur sebesar Rp.95.412.946.960 dengan realisasi sebesar Rp.81.528.298.106 (85,45%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur terdiri dari:

1. Program Peningkatan akses dan kualitas jalan
2. Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL
4. Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an
5. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
6. Program peningkatan pelayanan angkutan
7. Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
8. Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas

3.2.2.10. Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah  
Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 37  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	1 Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.529,30	4.868,86	4306,14	88,44	6227,1	69,15
		2 Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.997,70	7.373,16	6914,81	93,78	8875	77,91
		3 Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.157,40	7.648,60	7264,81	94,98	9613,4	75,57
		4 Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1.523,19	1416,24	92,98	1951	72,59
		5 Pertumbuhan Investasi	persen	5,00	5,00	13	260,00	5	260,00
		6 Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	81,38	82,20	83,44	101,51	87,76	95,08
		7 Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,67	0,68	0,688	101,18	0,72	95,56
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>118,98</b>		<b>106,55</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan daya saing ekonomi daerah pada tahun 2020 sebesar 118,98% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir

RPJMD tahun 2024 sebesar 106,55% (sangat tinggi). capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Kinerja pembangunan penanaman modal/investasi ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah nilai investasi PMA, Jumlah nilai investasi PMDN dan Survey kepuasan pelayanan perijinan. Pada tahun 2020 untuk indikator Jumlah nilai investasi PMA dan jumlah nilai investasi PMDN berstatus perlu kerja keras sedangkan indikator survey kepuasan pelayanan perijinan berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 38  
Capaian Kinerja Penanaman Modal/Investasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
1	Nilai investasi PMA	95.721	78.750	0,4104	0,4104
2	Nilai investasi PMDN	3.501	2.391	0,16465	0,16465
3	Survey kepuasan pelayanan perijinan	89	87	87	87

Sumber : BPMPTSP Kabupaten Magelang, 2021

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja pembangunan aspek daya saing adalah:

- Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh OPD di Kabupaten Magelang;
- Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dokumen perencanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- Adanya transparansi dalam tata kelola pemerintahan;
- Dukungan kompetensi SDM yang memadai;

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah: belum optimalnya peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif dikarenakan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya tertata dengan baik.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Magelang dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah diantaranya : Pada bidang hak asasi manusia dimana Kabupaten Magelang memperoleh Penghargaan Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Penghargaan atas komitmen pengurangan resiko bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Gambar 3.6 Penghargaan Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.7 Penghargaan Atas Komitmen Pengurangan Resiko Bencana Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



Adaya pandemi *Covid-19* selama tahun 2020 menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi. Akibat yang terjadi saat ini di Kabupaten Magelang antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena Covid-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah:

1. Pengangguran meningkat
  2. Kemiskinan meningkat
  3. Kesejahteraan masyarakat turun
  4. Kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan menurun
- Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah sebesar Rp. 43.270.467.793 dengan realisasi Rp.39.149.313.255 (90,48%).



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah terdiri dari:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
4. Program Pembinaan dan Penataan Pasar
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
11. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
14. Program Pengembangan Industri
15. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata
16. Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif
17. Program Pelayanan Investasi
18. Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi
19. Program Pelayanan Perijinan
20. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
21. Program Penegakan Perda
22. Program Penanggulangan Kebakaran
23. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
24. Program Penanggulangan Bencana
25. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
27. Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

3.2.2.11. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 39  
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1 Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	61,04 (B)	63,03 (B)	60,10(B)* *)	95,35	71,00 (BB)	84,65
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>95,35</b>		<b>84,65</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar/ada.

Dikarenakan nilai AKIP tahun 2020 dari Kemenpan RB belum keluar, maka data capaian kinerja tahun 2020 mengacu pada hasil penilaian tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 95,35% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 84,65% (tinggi).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 (CC), tahun 2019 sebesar 60.10 (B)



Gambar 3.8 Penghargaan Kearsipan Nasional kategori Sangat Memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintahan sebesar Rp.38.750.830.597 dengan realisasi Rp.31.898.476.623 (82,32%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan terdiri dari:

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
2. Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
5. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan
6. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
7. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
8. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan
9. Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi
10. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
11. Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan
12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD
13. Program Pelayanan Publik Kecamatan
14. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
18. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
19. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
20. Program Penelitian dan Pengkajian Daerah

3.2.2.12. Sasaran strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 40  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,19-2,30	2,31-2,50	2,94	117,60	2,86-3,1	94,84
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>117,60</b>		<b>94,84</b>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020 sebesar 117,60% (sangat

tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 94,84% (sangat tinggi).

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. indeks SPBE Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 2,18 masuk dalam kategori cukup, tahun 2019 adalah 2,74 masuk kategori baik dan tahun 2019 meningkat menjadi 2,94 masuk kategori baik.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp.6.883.170.375 dengan realisasi Rp.6.508.721.293 (94,56%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik
5. Program Persandian

### 3.2.2.13. Sasaran Strategis : Meningkatkan pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 41  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	1 Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP**)	100,00	WTP	100,00
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*\*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar/ada.

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah pada tahun 2020 sebesar 100% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% (sangat tinggi).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil penilaian Opini laporan keuangan tahun 2020 dari BPK belum keluar, maka data capaian mengacu pada hasil penilaian tahun 2019.

Tabel 3. 42  
Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 hingga 2016 selalu memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu dinilai tidak wajar. Namun, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Pada tahun 2017-2019 Kabupaten Magelang bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah sebesar Rp.14.277.771.454 dengan realisasi Rp.12.279.291.480 (86,00%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Aset Daerah

### 3.2.2.14. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 43  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,74	83,00	83,69	100,83	86,00	97,31
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>100,83</b>		<b>97,31</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2020 sebesar 100,83% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir rpjmd tahun 2024 sebesar 97,31% (sangat tinggi).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup, pada tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik dan tahun 2019 sebesar 83,03 dan 2020 sebesar 83,69 Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp.5.824.550.000 dengan realisasi Rp.5.685.765.834 (97,62%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

3.2.2.15. Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 44  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Akhir RPMJD (2024)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	1 Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,49	0,55	0,6***)	109,09	0,71	84,51
<b>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :</b>							<b>109,09</b>		<b>84,51</b>

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

Catatan : \*\*\*) Angka sementara, nilai resmi dari BKN belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian pada tahun 2020 sebesar 109,09% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 84%. Penghitungan di atas bersifat sementara berdasarkan penilaian mandiri dan hasil penilaian dari BKN belum keluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara ASN (IP ASN) Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP ASN pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian sebesar Rp.2.763.110.373 dengan realisasi Rp.2.539.597.285 (91,91%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian terdiri dari:



1. Program Informasi dan Pengadaan Pegawai
2. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur
3. Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai

### **3.3. Analisa Efisiensi**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efisiensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efisiensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efisiensi.

Tingkat efisiensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 8,23%, tingkat efisiensi ini belum menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncana tidak terlaksana dan tidak adanya serapan anggaran untuk pelaksanaan anggaran.

Analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 46  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>									
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	98,98	Program Pendidikan Sekolah Dasar	103.306.463.888	28.490.122.515	27,58	TE
		2	Harapan Lama Sekolah	98,28	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.969.111.203	22.172.226.379	47,21	TE
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	102,74	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760	2.252.413.213	83,20	16,80
					Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420	40.383.214.570	94,44	5,56
					Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.366.670.063	2.262.492.713	95,60	4,40
					Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	161.686.125	146.735.985	90,75	9,25
					Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970	996.319.124	96,81	3,19
Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	286.893.070	275.682.197	96,09	3,91					
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	100,22	Program Pelayanan Kesehatan	180.181.934.986	141.775.741.956	78,68	21,32
					Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	98.000.827.211	88.575.666.926	90,38	9,62
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33.223.844.803	27.884.428.452	83,93	16,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Sumber Daya Kesehatan	10.577.132.139	9.164.849.309	86,65	13,35	
				Program Kesehatan Masyarakat	4.351.312.880	3.593.536.194	82,59	17,41	
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	108,62	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	793.840.760	768.339.681	96,79	3,21
					Program Pemberdayaan Sosial	1.251.047.970	1.201.990.215	96,08	3,92
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	101,39	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	997.260.675	967.196.700	96,99	3,01
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	106,21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	306.725.460	302.977.861	98,78	1,22
					Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	4.670.797.180	4.581.164.598	98,08	1,92
6	Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	57,67	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.150.267.600	2.015.570.812	93,74	TE
					Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	234.131.165	233.199.700	99,60	TE
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,57	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	221.643.700	219.866.714	99,20	0,80
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	100,00	Program Keluarga Berencana	7.463.665.665	5.881.606.165	78,80	21,20
					Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	249.376.660	248.276.620	99,56	0,44
<b>B</b>	<b>MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>								
8	Tercapainya kualitas	11	IKLH	98,86	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	726.177.210	716.003.196	98,60	1,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	lingkungan hidup yang baik			Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	85.204.910	83.364.422	97,84	2,16	
				Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	10.799.791.450	8.695.737.414	80,52	19,48	
				Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.277.307.000	2.212.773.152	97,17	2,83	
				Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	747.099.930	744.919.302	99,71	0,29	
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	103,19	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	36.024.716.837	87,18	12,82
					Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	5.635.379.163	68,23	31,77
					Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	8.882.067.735	93,76	6,24
					Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.904.473.125	1.835.912.748	96,40	3,60
					Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	5.667.244.281	55,14	44,86
					Program peningkatan pelayanan angkutan	815.233.250	782.404.421	95,97	4,03
					Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	665.058.905	636.593.407	95,72	4,28
					Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	22.694.077.380	22.063.979.514	97,22	2,78
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	88,44	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.142.000	48.141.150	100,00	TE
					Program Pemberdayaan Usaha Mikro	197.037.000	196.769.386	99,86	TE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	192.510.000	190.809.715	99,12	TE
				Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.345.546.000	2.950.390.221	88,19	TE
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrollogian	186.538.470	185.721.936	99,56	TE
		14	93,78	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.215.047.600	1.162.427.260	95,67	TE
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	463.033.100	458.496.020	99,02	TE
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.248.628.830	1.180.224.309	94,52	TE
				Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	531.587.498	453.932.700	85,39	TE
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.431.144.605	6.117.084.872	95,12	TE
				Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	286.298.630	285.665.880	99,78	TE
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.808.882.929	1.764.294.683	97,54	TE
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	756.085.080	752.734.281	99,56	TE
		15	94,98	Program Pengembangan industri	216.440.600	202.910.082	93,75	TE
		16	92,98	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	8.213.170.264	5.829.865.902	70,98	TE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	139.106.076	138.528.893	99,59	TE	
		17	Pertumbuhan Investasi	260,00	Program Pelayanan Investasi	20.793.040	20.682.840	99,47	0,53
					Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	37.744.500	35.449.115	93,92	6,08
					Program Pelayanan perijinan	333.550.000	330.093.467	98,96	1,04
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	101,51	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.808.697.000	2.782.434.807	99,06	0,94
					Program Penegakan Perda	252.696.000	236.466.000	93,58	6,42
					Program Penanggulangan Kebakaran	7.885.458.000	7.818.937.840	99,16	0,84
					Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	368.700.900	265.342.510	71,97	28,03
					Program Penanggulangan Bencana	2.938.216.690	2.757.253.625	93,84	6,16
		19	Indeks Desa Membangun	101,18	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895	1.011.389.500	93,46	6,54
					Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	444.410.015	437.586.103	98,46	1,54
					Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1.818.863.071	1.535.680.158	84,43	15,57
<b>C</b>	<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>								
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	20	Nilai AKIP	95,35	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	60.668.980	60.491.380	99,71	TE
					Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	136.465.200	136.104.465	99,74	TE



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemerintahan			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.301.886.200	1.921.356.816	83,47	TE
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	424.018.510	416.723.850	98,28	TE
				Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.292.359.000	1.270.125.726	98,28	TE
				Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	873.041.500	708.907.500	81,20	TE
				Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	202.835.020	194.528.250	95,90	TE
				Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	332.829.200	1.587.119.179	97,66	TE
				Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	290.483.200	288.547.243	99,33	TE
				Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	596.523.500	578.542.470	96,99	TE
				Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	768.199.800	766.120.775	99,73	TE
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	19.335.571.680	12.071.820.926	62,43	TE
				Program Pelayanan Publik Kecamatan	218.335.982	202.656.445	92,82	TE
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8.191.343.245	8.137.178.403	99,34	TE
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	1.500.475.580	1.415.066.070	94,31	TE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Kebijakan KDH					
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	920.675.161	96,91	TE	
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	274.083.085	97,84	TE	
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	160.837.480	87,81	TE	
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	398.200.124	95,19	TE	
				Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	389.391.275	98,80	TE	
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	117,60	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.448.380.400	4.219.929.442	94,86	5,14
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	378.981.900	356.432.000	94,05	5,95
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.534.287.225	1.436.511.209	93,63	6,37
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	57.096.850	55.849.850	97,82	2,18
					Program Persandian	464.424.000	439.998.792	94,74	5,26
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	100,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.954.608.845	5.646.007.933	94,82	5,18
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.501.900.190	3.707.193.523	82,35	17,65
					Program Pengelolaan Aset Daerah	3.821.262.419	2.926.090.024	76,57	23,43
14	Meningkatnya kualitas	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,83	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	4.508.062.202	98,60	1,40

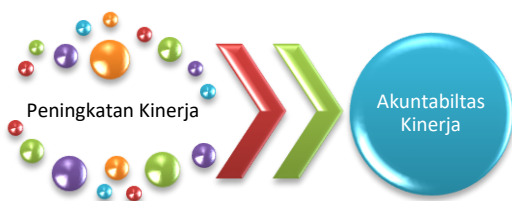
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Anggaran Tahun 2020				Tingkat Efisiensi
					Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	pelayanan publik				Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	436.919.170	97,29	2,71
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	740.784.462	92,20	7,80
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	109,09	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	1.220.088.142	1.206.153.031	98,86	1,14
					Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.233.899.106	1.029.810.429	83,46	16,54
					Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	309.123.125	303.633.825	98,22	1,78
<b>Jumlah :</b>						<b>766.081.695.405</b>	<b>14.935.622.926</b>	<b>73,66</b>	<b>8,23</b>

Keterangan : TE (Tidak ada efisiensi)

### 3.4. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi pada beberapa bidang pembangunan, beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Magelang selama Tahun 2020 antara lain:

1. Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri.
3. Penghargaan Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Penghargaan sebagai Perpustakaan Kabupaten/Kota terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
5. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
6. Penghargaan atas komitmen pengurangan resiko bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
7. Penghargaan Kearsipan Nasional kategori Sangat Memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
8. Juara Terbaik Harapan II Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota (*JDIH Award*) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



## BAB IV PENUTUP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

P  
e  
n  
u  
t  
u  
p

Capaian kinerja tujuan strategis Kepala Daerah tahun 2020 sebesar 82,02% (tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja tujuan telah tercapai 74,52% (sedang). Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis belum tercapai sesuai target, baik terhadap target tahun 2020 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2024.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 sebesar 107,19% (sangat tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran sebesar 96,56% (sangat tinggi). Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui dibandingkan target kinerja tahun 2020, sedangkan jika dibandingkan target akhir periode RPJMD pada tahun 2024 baru mendekati target yang ditetapkan.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai rata-rata 73,66% dengan kategori Sedang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,38% jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,04%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91%  $\leq$  100%) sebanyak 71 (73,96%) program, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi program tertinggi sebesar 111(72,08%). Capaian program Sangat Rendah pada kategori sedang ( $\leq$  50 %) sebanyak 2 (2,08%) program, jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 0,97%, dengan realisasi sebanyak 5 (3,25%) program, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan perbaikan. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2020 sebanyak 71 program sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 111 program sehingga berkurang sebesar 36,04%, hal ini menunjukkan efisiensi dalam penganggaran.

Tingkat efisiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,23%, tingkat efisiensi tersebut naik

dibandingkan tahun 2019 dengan tingkat efisiensi sebesar 7,85%. Tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik.

Dalam penyusunan dokumen dijumpai permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis diantaranya:

1. Masih terdapat data yang belum keluar atau indikator tersebut tidak digunakan lagi sebagai indikator pembangunan.
2. Masih terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang berubah rumus pengukurannya, sehingga menyulitkan dalam proses analisa.
3. Kesulitan di dalam mengumpulkan data kinerja dari SKPD, dimana perangkat daerah belum bisa menghitung capaian kinerjanya. Alternatif solusi dari permasalahan di atas antara lain:
  1. Perubahan RPJMD terkait Permendagri 90 tahun 2019, sekaligus melakukan penyesuaian indikator kinerja.
  2. Melakukan perubahan indikator sesuai dengan tingkatannya serta memastikan rumus penghitungan indikator tidak berubah-ubah dan lebih terukur dengan menerapkan pola *Cascading*.
  3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam perolehan dan pengolahan indikator.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kota Mungkid, / Oktober 2020



BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN MAGELANG					
No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
<b>A</b>	<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,58	Angka (0-100)
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi	2,5-4,0	persen
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	9.400,64	ribu rupiah
		4	Angka Kemiskinan	9,43-10,43	persen
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,21	angka (0-100)
<b>B</b>	<b>MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>				
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,1-5,6	persen
		7	PDRB Per Kapita	26,7	juta rupiah
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	69,93	persen
<b>C</b>	<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	65,53	Angka (0-100)

**INDIKATOR SASARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
<b>A</b>	<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>				
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	7,86	tahun
		2	Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	94,41	persen
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	73,56	tahun
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	0,58	persen
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	78,42	Angka (0-100)
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	63,77	persen
6	Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,4-3,0	persen
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,33	angka (0-100)
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori
<b>B</b>	<b>MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>				
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	IKLH	72,12	angka (0-100)
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	67,74	persen
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	4.868,86	milyar rupiah
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.373,16	milyar rupiah
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	7.648,60	milyar rupiah
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.523,19	milyar rupiah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		17	Pertumbuhan Investasi	5	persen
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	86,42	persen
		19	Indeks Desa Membangun	0,68	angka (0-1)
<b>C</b>					
<b>MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	63,03 (B)	angka (0-100) (huruf)
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,31 – 2,50	angka (0-5)
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	WTP	-
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	angka (0-100)
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	0,55	angka (0-1)

**PROGRAM DAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN SUMBER ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>		Dana Alokasi Umum
A	Urusan Pendidikan		Dana Alokasi Khusus
1	Program Pendidikan Sekolah Dasar	103.306.463.888	Dana Bagi Hasil
2	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.969.111.203	Pajak/ Bukan Pajak
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.707.267.760	Pendapatan Asli
4	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	42.762.178.420	Daerah
B	Urusan Kesehatan		Hibah
1	Program Pelayanan Kesehatan	180.181.934.986	SILPA
2	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	8.598.246.811	
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33.223.844.803	
4	Program Sumber Daya Kesehatan	10.577.132.139	
5	Program Kesehatan Masyarakat	4.351.312.880	
6	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	89.402.580.400	
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	41.324.486.900	
2	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	8.259.165.600	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	9.472.702.000	
4	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.904.473.125	
5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	10.277.749.800	
D	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	306.725.460	
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	4.670.797.180	
E	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.808.697.000	
2	Program Penegakan Perda	252.696.000	
3	Program Penanggulangan Kebakaran	7.885.458.000	
4	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	368.700.900	
5	Program Penanggulangan Bencana	2.938.216.690	
F	Urusan Sosial		
1	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	793.840.760	
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.251.047.970	
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
G	Urusan Tenaga Kerja		
1	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.150.267.600	
2	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	234.131.165	
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	221.643.700	
I	Urusan Pangan		
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	997.260.675	
J	Urusan Lingkungan Hidup		
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	726.177.210	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	85.204.910	
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	10.799.791.450	
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.277.307.000	
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	747.099.930	
K	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		
1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	



<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN SUMBER ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
L	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895	
2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	444.410.015	
3	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1.818.863.071	
M	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Program Keluarga Berencana	7.463.665.665	
2	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	249.376.660	
N	Urusan Perhubungan		
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	815.233.250	
2	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	665.058.905	
3	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	22.694.077.380	
O	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.448.380.400	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	378.981.900	
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.534.287.225	
P	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.142.000	
2	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	197.037.000	
Q	Urusan Penanaman Modal		
1	Program Pelayanan Investasi	20.793.040	
2	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	37.744.500	
3	Program Pelayanan perijinan	333.550.000	
R	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.366.670.063	
2	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	161.686.125	
S	Urusan Statistik		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	57.096.850	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
T	Urusan Persandian		
1	Program Persandian	464.424.000	
U	Urusan Kebudayaan		
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1.029.187.970	
V	Urusan Perpustakaan		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	286.893.070	
W	Urusan Kearsipan		
1	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	60.668.980	
2	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	136.465.200	
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>		
X	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.215.047.600	
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	463.033.100	
Y	Urusan Pariwisata		
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	8.213.170.264	
2	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	139.106.076	
Z	Urusan Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.248.628.830	
2	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	531.587.498	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.431.144.605	
4	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	286.298.630	
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.808.882.929	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	756.085.080	
AA	Urusan Perdagangan		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	192.510.000	
2	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.345.546.000	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	186.538.470	
AB	Urusan Perindustrian		
1	Program Pengembangan industri	216.440.600	
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		
AC	Urusan Administrasi Pemerintahan		
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.301.886.200	
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	424.018.510	
3	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.292.359.000	
4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	873.041.500	
5	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	202.835.020	
6	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	332.829.200	
7	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	290.483.200	
8	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	596.523.500	
9	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	768.199.800	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	19.335.571.680	
11	Program Pelayanan Publik Kecamatan	218.335.982	
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8.191.343.245	
AD	Urusan Pengawasan		
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.500.475.580	
AE	Urusan Perencanaan		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	950.068.500	
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	280.127.500	
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	183.161.500	
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	418.331.000	

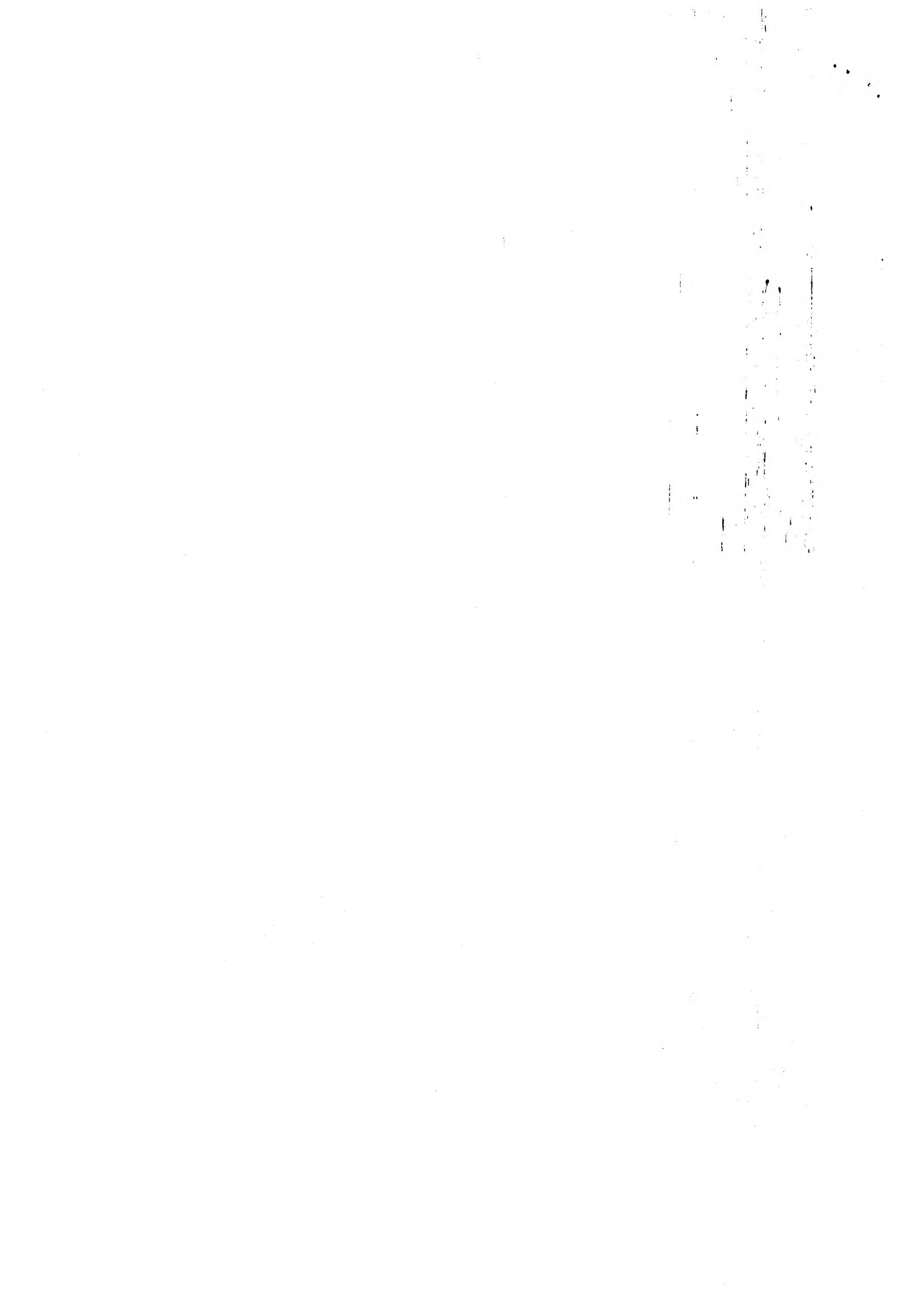
NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
AF	Urusan Keuangan		
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.954.608.845	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.501.900.190	
3	Program Pengelolaan Aset Daerah	3.821.262.419	
AG	Urusan Kepegawaian		
1	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	1.220.088.142	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.233.899.106	
3	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	309.123.125	
AH	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	394.105.500	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>766.081.695.405</b>	

Kota Mungkid, / Oktober 2020


  
**BUPATI MAGELANG**
  

  
**ZAENAL ARIFIN, S.I.P.**







**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN MAGELANG					
No	Tujuan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
<b>A MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>					
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,58	Angka (0-100)
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi	2,5-4,0	persen
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	9.400,64	ribu rupiah
		4	Angka Kemiskinan	9,43-10,43	persen
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,21	angka (0-100)
<b>B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>					
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,1-5,6	persen
		7	PDRB Per Kapita	26,7	juta rupiah
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	69,93	persen
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	65,53	Angka (0-100)

**INDIKATOR SASARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
<b>A</b>	<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>				
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	7,86	tahun
		2	Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	94,41	persen
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	73,56	tahun
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	0,58	persen
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	78,42	Angka (0-100)
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	63,77	persen
6	Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,4-3,0	persen
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,33	angka (0-100)
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori
<b>B</b>	<b>MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>				
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	IKLH	72,12	angka (0-100)
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	67,74	persen
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	4.868,86	milyar rupiah
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	7.373,16	milyar rupiah
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	7.648,60	milyar rupiah
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.523,19	milyar rupiah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
		17	Pertumbuhan Investasi	5	persen
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	86,42	persen
		19	Indeks Desa Membangun	0,68	angka (0-1)
<b>C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	63,03 (B)	angka (0-100) (huruf)
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,31 – 2,50	angka (0-5)
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	WTP	-
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	angka (0-100)
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	0,55	angka (0-1)

## PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>		Dana Alokasi Umum
A	Urusan Pendidikan		Dana Alokasi Khusus
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	60.470.408.888	Dana Bagi Hasil
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.598.607.800	Pajak/ Bukan Pajak
3	Program Pendidikan Sekolah Dasar	96.043.526.000	Pendapatan Asli
4	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.133.395.052	Daerah
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	6.417.223.450	Hibah
6	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	47.404.110.700	SILPA
B	Urusan Kesehatan		
7	Program Pelayanan Kesehatan	207.941.589.556	
8	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	23.135.700.257	
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	28.895.697.966	
10	Program Sumber Daya Kesehatan	9.064.909.000	
11	Program Kesehatan Masyarakat	5.865.005.200	
12	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	82.930.183.728	
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
13	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	98.501.869.500	
14	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	15.656.832.000	
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	26.718.477.500	
16	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	1.991.790.000	
17	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	4.876.314.800	
D	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
18	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	4.364.336.000	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
19	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	5.714.581.000	
E	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
20	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	406.652.000	
21	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.400.969.000	
22	Program Penegakan Perda	546.675.000	
23	Program Penanggulangan Kebakaran	8.079.595.000	
24	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	820.000.000	
25	Program Penanggulangan Bencana	6.614.807.000	
F	Urusan Sosial		
26	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	2.135.562.700	
27	Program Pemberdayaan Sosial	2.619.004.100	
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
G	Urusan Tenaga Kerja		
1	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.521.200.000	
2	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	870.952.000	
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.046.607.000	
I	Urusan Pangan		
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.332.121.245	
J	Urusan Lingkungan Hidup		
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	1.609.882.000	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	750.000.000	
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	15.103.254.000	
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	4.646.542.000	
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	2.566.533.000	
K	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	6.068.676.000	
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	787.204.000	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	902.209.000	
L	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.402.038.000	
2	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	1.454.924.500	
3	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	495.000.000	
M	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Program Keluarga Berencana	8.033.704.000	
2	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	727.875.000	
N	Urusan Perhubungan		
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.075.000.000	
2	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2.050.000.000	
3	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	36.915.911.000	
O	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.103.569.600	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	395.000.000	
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.260.041.000	
P	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	3.350.934.015	
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	439.751.150	
3	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	4.239.400.000	
Q	Urusan Penanaman Modal		
1	Program Pelayanan Investasi	450.000.000	
2	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	130.000.000	
	Program Pelayanan perijinan	500.000.000	
R	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		



NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	21.324.977.000	
2	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	834.500.000	
S	Urusan Statistik		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	950.000.000	
T	Urusan Persandian		
1	Program Persandian	720.500.000	
U	Urusan Kebudayaan		
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	3.495.561.000	
V	Urusan Perpustakaan		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	1.300.152.820	
W	Urusan Kearsipan		
1	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	255.000.000	
2	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	410.000.000	
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>		
X	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2.791.509.000	
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	1.140.000.000	
Y	Urusan Pariwisata		
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	15.392.709.000	
2	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	1.805.000.000	
Z	Urusan Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.954.715.500	
2	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	1.819.277.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	7.573.517.334	
4	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.401.249.820	
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.652.363.196	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.094.200.000	
AA	Urusan Perdagangan		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	898.020.000	
2	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	3.481.403.000	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	649.909.260	
AB	Urusan Perindustrian		
1	Program Pengembangan industri	1.120.104.000	
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		
AC	Urusan Administrasi Pemerintahan		
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	3.724.703.000	
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	837.170.500	
3	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.912.271.000	
4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	2.743.552.000	
5	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	730.000.000	
6	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	643.725.000	
7	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	952.523.000	
8	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	1.555.695.000	
9	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	1.556.453.000	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	23.644.047.760	
11	Program Pelayanan Publik Kecamatan	588.344.623	
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	11.013.285.060	
AD	Urusan Pengawasan		
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.753.500.000	
AE	Urusan Perencanaan		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.354.942.000	

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER AN
1	2	3	4
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	240.000.000	
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1.004.054.000	
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	1.737.634.800	
AF	Urusan Keuangan		
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.210.557.000	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.077.488.000	
3	Program Pengelolaan Aset Daerah	3.252.960.000	
AG	Urusan Kepegawaian		
1	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	2.682.890.220	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	7.465.522.000	
3	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	667.099.000	
AH	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
1	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	1.720.000.000	
<b>JUMLAH :</b>		<b>1.075.709.236.600</b>	

Kota Mungkid, 2 Januari 2020



BUPATI MAGELANG

ARIFIN, S.I.P.



